

**PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
KENDARI****Eda Nur Indah^{1*}, Erwin Hadisantoso², Vina Olivia Pebrianty³***Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia***Email Korespondensi: edanurindah17@gmail.com***ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze the effect of the Regional Financial Information System (SIKD) on budget management accountability at the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Kendari City. Using a purposive sampling method, a sample of 53 respondents was selected, consisting of staff involved in financial reporting, budgeting, and treasury operations. Data were collected via structured questionnaires and analyzed using simple linear regression via IBM SPSS Statistics version 27. The results demonstrate that the Regional Financial Information System has a positive and significant effect on budget management accountability both partially and simultaneously. These findings highlight that enhancing system quality, information accuracy, and transparency directly improves public budget accountability within the local government context.

Keywords: *Regional Financial Information System, Budget Management Accountability, Kendari City BPKAD.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 53 responden pegawai yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan, pemanfaatan SIKD, serta bidang anggaran dan perbendaharaan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana berbasis IBM SPSS Statistics versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran secara parsial maupun simultan dengan koefisien determinasi (R^2) yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi transparansi, kualitas sistem, dan akurasi informasi keuangan daerah menjadi pendorong utama peningkatan akuntabilitas publik di BPKAD Kota Kendari.

Kata Kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran, BPKAD Kota Kendari.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Dalam era tata kelola pemerintahan yang modern dan bertransformasi menuju efisiensi publik, pengelolaan keuangan daerah menjadi pilar sentral keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah tidak lagi sekadar diukur dari seberapa besar tingkat penyerapan anggaran, melainkan sejauh mana seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, efisien, dan transparan kepada publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan pengelolaan keuangan publik yang taat pada asas keadilan, kepatuhan, dan transparansi guna menekan potensi deviasi serta korupsi.

Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.07/2016 jo. PMK Nomor 24/PMK.07/2020 mewajibkan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD dirancang sebagai platform terintegrasi berbasis teknologi informasi untuk memodernisasi siklus penganggaran, meminimalisir kesalahan manual (*human error*), serta mempercepat pengolahan data pertanggungjawaban keuangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari memegang peranan vital sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mengoordinasikan seluruh rantai penganggaran dan perbendaharaan di Kota Kendari. Meskipun implementasi SIKD (yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah / SIPD) telah berjalan, kondisi faktual sebagaimana tertuang dalam Renstra BPKAD Kota Kendari 2023-2026 menunjukkan sejumlah hambatan struktural, seperti terbatasnya kapasitas SDM bidang akuntansi-IT serta keterbatasan infrastruktur jaringan. Fenomena batasan akses fungsional yang ketat dan efektivitas pemanfaatan sistem ini menjadi ruang penting untuk diteliti secara empiris. Penulisan artikel ilmiah ini disusun mengikuti format standar penulisan berkala ilmiah Universitas Halu Oleo (UHO).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (masyarakat/publik sebagai pemilik sumber daya) dan agen (pemerintah daerah sebagai pengelola dana). Asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal berpotensi memicu *moral hazard* dan tindakan oportunistik. SIKD hadir sebagai mekanisme pemantauan (*monitoring mechanism*) yang transparan dan akuntabel untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut melalui penyediaan data pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu.

Teori Kualitas Informasi (DeLone & McLean Model)

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (1992) menyatakan bahwa Kualitas Sistem (*System Quality*) dan Kualitas Informasi (*Information Quality*) memengaruhi penggunaan sistem (*Use*) dan Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), yang pada akhirnya berdampak pada Dampak Individu dan Dampak Organisasi. Dalam konteks BPKAD Kota Kendari, kualitas SIKD berdampak langsung pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan SIKD secara optimal memfasilitasi pencatatan transaksi secara *real-time*, menekan kesalahan matematis, serta menghasilkan laporan realisasi anggaran yang memenuhi asas

akuntabilitas kejujuran, hukum, proses, program, dan kebijakan. Berdasarkan uraian teoritis dan empiris terdahulu, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada BPKAD Kota Kendari.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang berlokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai BPKAD Kota Kendari yang terlibat dalam fungsi penganggaran, akuntansi, dan perbendaharaan. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria kualifikasi teknis tertentu, sehingga diperoleh sampel final sebanyak 53 responden.

Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Pengujian kualitas data meliputi Uji Validitas (*Pearson Product Moment*) dan Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha* > 0,60). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana serta Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Linearitas) dengan bantuan software IBM SPSS Statistics versi 27.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pegawai di lingkungan BPKAD Kota Kendari. Seluruh kuesioner yang dibagikan berhasil dikumpulkan kembali secara lengkap dengan tingkat pengembalian mencapai 100% (53 responden) dan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan karakteristik jabatan, responden terbanyak didominasi oleh Pengelola Data sebanyak 14 orang (26%), Verifikator Keuangan 6 orang (11%), serta Pengelola Data Perencanaan Anggaran 5 orang (9%), sedangkan sisanya tersebar pada pelbagai posisi struktural dan teknis seperti Kepala Bidang, Sub Koordinator, Analis, Bendahara, hingga Verifikator Anggaran yang secara langsung menangani pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Karakteristik Tingkat Pengembalian kuisioner

Uraian	Jumlah (Responden)	Persentase (%)	Uraian
Kuesioner yang di bagi	53	100%	Kuesioner yang di bagi
Kuesioner yang kembali	53	100%	Kuesioner yang kembali
Kuesioner yang tidak kembali	0	0	Kuesioner yang tidak kembali
Jumlah kuesioner yang dapat di analisis	53	100%	Jumlah kuesioner yang dapat di analisis

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Kelompok Jabatan	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
Pejabat Struktural & Pimpinan (Sekretaris, Kabid)	4	8%
Sub Koordinator & Analis Ahli Muda	8	15%
Staf Analis & Penelaah (Keuangan, Anggaran, Perencanaan)	6	11%
Staf Pengelola Data & Pelaporan (Keuangan, Anggaran, Akuntansi)	22	42%
Verifikator (Keuangan & Anggaran)	9	17%
Bendahara & Teknis IT (Bendahara Pengeluaran, Analis Sistem Informasi)	4	8%
Total	53	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di BPKAD Kota Kendari. Pengukuran indikator menggunakan skala Likert 5 poin, di mana interval rerata skor dikelompokkan ke dalam kategori penilaian untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan sistem serta tingkat akuntabilitas yang dipersepsikan oleh para pegawai

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,77 dan berada pada kategori Baik. Penilaian indikator tertinggi dicapai oleh Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna yang masing-masing memperoleh nilai rata-rata 3,86, diikuti oleh Dampak Organisasi (3,79), Kualitas Sistem (3,75), Penggunaan (3,74), serta Dampak Individu (3,62). Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang diterapkan di BPKAD Kota Kendari mampu menyediakan data yang akurat, andal, serta mempermudah pegawai dalam menunjang operasional pengelolaan keuangan

Tabel 3. Deskripsi Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah

Indikator	Nilai Rata-rata	Kategori
Kualitas Sistem	3,75	Baik
Kualitas Informasi	3,86	Baik
Penggunaan	3,74	Baik
Kepuasan Pengguna	3,86	Baik
Dampak Individu	3,62	Baik
Dampak Organisasi	3,79	Baik
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	3,77	Baik

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran diukur melalui empat dimensi utama dengan perolehan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,72 yang tergolong dalam kategori **Baik**. Indikator Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum mencatatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,79, disusul oleh Akuntabilitas Program (3,73), Akuntabilitas Proses (3,69), serta Akuntabilitas Kebijakan (3,67). Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa penerapan sistem informasi yang terintegrasi telah berjalan efektif dalam mendukung kepatuhan operasional, keterbukaan informasi, serta penyusunan laporan keuangan yang presisi. Hal ini meminimalisir risiko penyimpangan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa BPKAD Kota Kendari telah menjalankan seluruh tahapan prosedur penganggaran yang taat asas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Indikator	Nilai Rata-rata	Kategori
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	3,79	Baik
Akuntabilitas Proses	3,69	Baik
Akuntabilitas Program	3,73	Baik
Akuntabilitas Kebijakan	3,67	Baik
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	3,72	Baik

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Hasil Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

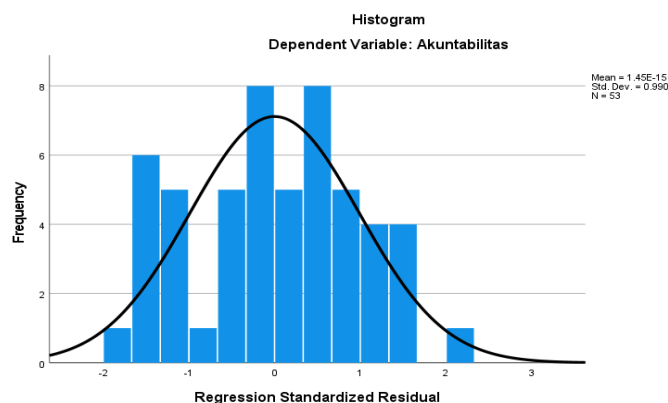
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (Y) memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar daripada r_{tabel} sebesar 0,271 dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian, seluruh butir instrumen dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X) sebesar 0,799 dan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (Y) sebesar 0,768, di mana keduanya melebihi nilai ambang batas kritis 0,70. Hal ini membuktikan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten untuk digunakan dalam analisis tahap selanjutnya

Tabel 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

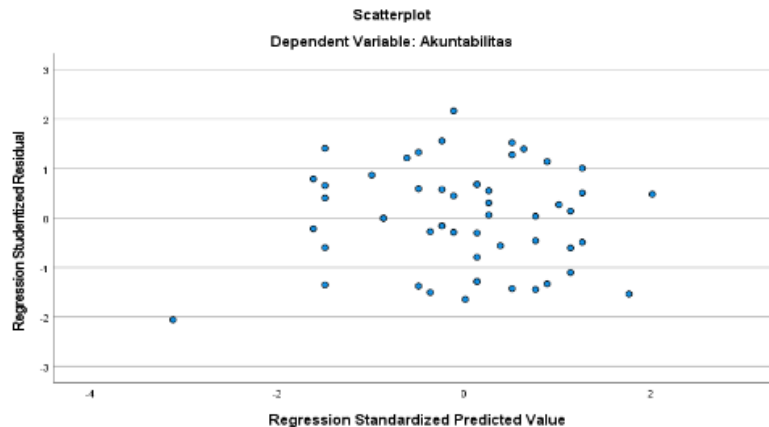
Variabel	Rentang r_{hitung}	r_{tabel}	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X)	0,339 - 0,580	0,271	0,799	Valid dan Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (Y)	0,388 - 0,673	0,271	0,768	Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear yang digunakan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) serta layak untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual penelitian telah memenuhi asumsi normalitas secara sempurna, di mana pada grafik histogram distribusi data residual membentuk pola simetris menyerupai kurva lonceng, dan pada grafik *Normal Probability Plot* titik-titik data menyebar berdempetan mengikuti arah garis diagonal. Selain itu, pengujian heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* memperlihatkan titik-titik data menyebar secara acak dan merata di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola teratur tertentu, yang mengindikasikan tidak terjadinya ketidaksamaan varians antar pengamatan. Dengan demikian, model regresi ini terbukti memenuhi kriteria normalitas dan bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga model estimasi sangat valid, andal, serta tidak bias untuk mengukur pengaruh SIKD terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di BPKAD Kota Kendari..



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram
Sumber: Output SPSS 22 (2026).



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot

Sumber: Output SPSS 22 (2026).

Selain itu, Uji linearitas lebih besar dari 5% ($p > 0,05$) atau ($0,469 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara sistem informasi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana dan Uji Hipotesis

Hasil pengujian Regresi sederhana dan Uji Hipotesis diperoleh nilai t hitung variabel sistem informasi keuangan daerah sebesar 7,364 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,008 serta nilai signifikansi sebesar $<0,001$ yang artinya $<0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, hipotesis diterima

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana dan Uji Hipotesis

Variabel Indikator	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Sig.	Keterangan
(Konstanta)	8,928	1,829	0,073	Signifikan
SIKD (X)	0,526	7,364	0,001	Signifikan (H1 Diterima)
R Square (R^2)	0,515			55.1% Variansi Y Dijelaskan X

H1 : Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Sumber: Data primer diolah, 2026

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t-hitung untuk variabel SIKD adalah 7,364 dengan tingkat signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada BPKAD Kota Kendari. Nilai koefisien regresi sebesar 0,526 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan efektivitas penerapan SIKD sebesar 1 satuan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebesar 0,526 satuan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,515 menunjukkan bahwa 51,5% variasi akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat dijelaskan oleh pemanfaatan SIKD, sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal,

transparansi laporan keuangan, kompetensi aparatur, pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, teknologi informasi, komitmen organisasi, maupun faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan Teori Agensi dan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean, di mana penguatan kualitas sistem dan informasi secara nyata meminimalisir penyimpangan anggaran serta meningkatkan pertanggungjawaban fiskal kepada publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada BPKAD Kota Kendari. Semakin tinggi kualitas, keandalan, dan pemanfaatan SIKD oleh aparatur keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kejujuran, hukum, proses, program, dan kebijakan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Saran

1. Bagi BPKAD Kota Kendari: Perlu ditingkatkan pelatihan berkelanjutan di bidang akuntansi berbasis IT serta penyempurnaan sarana infrastruktur jaringan guna mendukung operasional SIKD secara optimal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas cakupan variabel penelitian dengan menambahkan variabel moderasi atau mediasi seperti Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, R. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik di Sektor Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 18(1), 45-58.
- Artika, I., et al. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 112-125.
- Defana, M., & Rahayu, S. (2023). Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Sektor Publik*, 5(1), 22-35.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60-95.
- Fajri, N., et al. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(1), 15-28.
- Fitriandini, R., & Widajantie, T. D. (2021). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 88-99.
- Inuzula, L., & Bustami. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Pemerintah Kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 101-114.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Lazuardi, M., et al. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi SIPD. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 4(1), 12-25.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Piri, R., et al. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit*, 9(1), 34-45.
- Priscilla, C., et al. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, 7(3), 140-152.

- Sabriani, N., & Rahayu, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 210-225.
- Sahrudin, et al. (2024). Evaluasi Peran SIKD Dalam Peningkatan Pertanggungjawaban APBD. *Jurnal Governance & Public Policy*, 8(1), 77-89.
- Salehoddin. (2025). Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(1), 50-64.
- Sopanah, A., & Wahyudi, E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Daerah. Malang: Intrans Publishing.
- Sriwijayanti, H. (2021). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD. *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89-101.
- Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1), 64-77.